

**THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN PREVENTING FRAUD  
IN VILLAGE GOVERNMENT**

**PERAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENCEGAH  
KECURANGAN DI PEMERINTAH DESA**

**Mohamad Djasuli<sup>1</sup>, Desi Indra Cahyani<sup>2</sup>, Nidaul Syofiyun Nahidoh<sup>3</sup>, Ismiyanti<sup>4</sup>, Awwaliya Putri Irawati<sup>5</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura<sup>1,2,3,4,5</sup>

[djasuli@trunojoyo.ac.id](mailto:djasuli@trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [desindra13@gmail.com](mailto:desindra13@gmail.com)<sup>2</sup>, [nidasofiyun@gmail.com](mailto:nidasofiyun@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ismiy0030@gmail.com](mailto:ismiy0030@gmail.com)<sup>4</sup>, [awaliyaputriirawati@gmail.com](mailto:awaliyaputriirawati@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the Internal Control System (ICS) in preventing fraud within village fund management by employing a critical literature review approach using recent scholarly works. Data were collected from national and international studies published between 2020 and 2025, focusing on key variables such as internal control systems, individual morality, moral sensitivity, spiritual intelligence, internal audit mechanisms, and whistleblowing systems. The synthesized findings show that ICS consistently exerts a positive and significant influence in reducing opportunities for fraud; however, its effectiveness is strongly shaped by non-technical factors, particularly the ethical quality of village apparatus. Individual morality and spiritual intelligence were found to strengthen the relationship between ICS and fraud prevention, acting as crucial moderating factors. Additionally, detection mechanisms such as internal audits and whistleblowing systems provide substantial contributions as complementary oversight layers. These results highlight that effective fraud prevention in village governance requires a multilayered defense model integrating structural controls, ethical integrity, and robust detection mechanisms.*

**Keywords:** Internal Control System, Fraud Prevention, Village Funds, Individual Morality, Internal Audit.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam mencegah kecurangan pada pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan pendekatan *critical literature review* terhadap berbagai penelitian terkini. Data diperoleh dari artikel nasional dan internasional tahun 2020–2025 yang memfokuskan kajian pada variabel SPI, moralitas individu, sensitivitas moral, kecerdasan spiritual, audit internal, serta sistem *whistleblowing*. Hasil sintesis menunjukkan bahwa SPI secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan dalam menekan peluang terjadinya fraud, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor non-teknis, terutama moralitas aparatur dan kecerdasan spiritual yang terbukti memperkuat hubungan antara SPI dan pencegahan fraud. Selain itu, mekanisme deteksi seperti audit internal dan sistem *whistleblowing* memberikan kontribusi substansial sebagai lapisan pengawasan tambahan. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan kecurangan di pemerintah desa memerlukan model pertahanan berlapis yang mengintegrasikan kontrol struktural, integritas etis, dan mekanisme deteksi yang memadai.

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud, Dana Desa, Moralitas Individu, Audit Internal.

**PENDAHULUAN**

Paradigma otonomi fiskal desa melalui kebijakan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat telah mengubah posisi desa menjadi aktor utama pembangunan nasional. Besarnya alokasi DD tidak hanya memperbesar kapasitas fiskal, tetapi juga menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan publik dengan standar transparansi dan

akuntabilitas yang tinggi (Rifai et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, desa tidak lagi hanya dipandang sebagai unit administratif paling bawah, melainkan sebagai entitas fiskal dengan tanggung jawab signifikan terhadap pembangunan lokal serta keberlanjutan kepercayaan publik. Namun demikian, transfer kewenangan dan distribusi sumber daya dalam jumlah besar juga menghadirkan

konsekuensi berupa meningkatnya risiko kecurangan (*fraud*) dan tindak korupsi. Fenomena ini secara konseptual digolongkan sebagai patologi keuangan publik, di mana moral hazard sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan masih tingginya asimetri informasi antara aparatur desa dan masyarakat (Pilianti & Rasmini, 2021). Hal tersebut sangat nyata dalam konteks Kabupaten Bangkalan, di mana laporan audit dan pengawasan menemukan bahwa kecurangan keuangan desa kerap dimanifestasikan melalui praktik pemalsuan laporan keuangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa mekanisme preventif yang diterapkan masih menghadapi kelemahan struktural maupun kelemahan institusional yang mendasar (Djasuli & Rohmi, 2025; Rifai et al., 2024).

Sebagai mekanisme pertahanan preventif utama, Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau dalam kerangka normatif dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berfungsi sebagai fondasi fundamental untuk menjamin tata kelola publik berjalan efektif, efisien, dan beretika. SPI dipahami sebagai proses yang integral dan berkesinambungan, dirancang dan diimplementasikan oleh seluruh aparatur organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi (Kusumastuti & Afriady, 2024). SPI tidak sekadar instrumen teknis, tetapi merupakan instrumen krusial yang memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan akuntabel serta mampu mencegah potensi fraud (Djasuli et al., 2022; Oktafiyanti & Auliyah, 2024). Walaupun penelitian empiris menunjukkan bahwa SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud (Romadaniati et al., 2020; Lorenza et al., 2024), literatur

kritis menegaskan bahwa efektivitasnya sangat ditentukan oleh dimensi non-struktural. Moralitas individu, misalnya, terbukti berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPI dan pencegahan fraud (Biduri, 2023). Demikian pula, kecerdasan spiritual aparatur desa terbukti mampu meningkatkan daya prediksi efektivitas SPI terhadap pencegahan fraud, bahkan secara simultan menjelaskan sebagian besar variasi dalam upaya mitigasi kecurangan (Buato et al., 2024). Selain itu, faktor lain seperti kompetensi aparatur dan efektivitas sistem whistleblowing juga berperan penting dalam memperkuat upaya mitigasi risiko fraud (Maulida & Bayunitri, 2021).

Bangkalan, audit internal yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten memainkan peran strategis sebagai mekanisme deteksi sekunder yang melengkapi fungsi preventif SPI. Inspektorat berfungsi sebagai *second line of defense* dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan dan memperbaiki kelemahan kontrol internal yang ada (Djasuli & Rohmi, 2025). Strategi pencegahan fraud tidak dapat hanya bergantung pada SPI semata, melainkan harus terintegrasi dengan faktor non-teknis dan pengawasan eksternal. Integrasi tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan rekomendasi kebijakan yang menyoroti potensi pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat pengawasan pengelolaan Dana Desa (Putra et al., 2022; Nurchoiriyah et al., 2025).

## KAJIAN TEORI

### Konsep SPI dan Besaran Pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan salah satu elemen fundamental dalam kerangka *good*

*governance*, yang diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP dimaknai sebagai proses integral yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan maupun seluruh aparatur, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam lingkup pemerintahan desa, SPI tidak sekadar menjadi perangkat administratif, tetapi berfungsi sebagai *defensive mechanism* yang mampu mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan, salah saji material, maupun fraud sejak tahap perencanaan program hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan (Kusumastuti & Afriady, 2024).

Fungsi preventif SPI dalam pengelolaan Dana Desa bersifat multidimensi. Pertama, SPI memastikan adanya otorisasi yang jelas atas setiap transaksi keuangan sehingga penggunaan dana tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kedua, adanya pemisahan fungsi atau tugas (*segregation of duties*) menciptakan mekanisme saling kontrol di antara aparatur desa, yang pada gilirannya menekan peluang kolusi. Ketiga, SPI memperkuat sistem pencatatan dan dokumentasi yang transparan sehingga setiap bentuk pengeluaran dapat ditelusuri dan diaudit. Dengan struktur demikian, peluang terjadinya penyalahgunaan dana dapat ditekan sedini mungkin.

Secara empiris, sejumlah penelitian memberikan bukti kuantitatif yang mendukung peran SPI. Studi yang dilakukan Romadaniati et al. (2020) di Kabupaten Bengkalis membuktikan bahwa SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan nilai koefisien regresi yang menunjukkan hubungan kuat

antara variabel-variabel pengendalian internal dengan mekanisme anti-fraud. Hasil ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh penelitian Lorenza et al. (2024) di Surakarta, yang menyimpulkan bahwa efektivitas SPI dalam lingkup desa sangat bergantung pada konsistensi implementasinya. Menariknya, hasil penelitian di dua wilayah tersebut konsisten meskipun kondisi sosio-ekonomi desa berbeda, sehingga menegaskan SPI sebagai faktor penjelas yang relatif stabil lintas konteks.

Temuan serupa juga dijumpai di Pamekasan, di mana penerapan SPI yang ketat berhasil mengantisipasi penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian Oktafiyanti & Auliyah (2024) menemukan bahwa mekanisme kontrol internal yang dijalankan secara disiplin selaras dengan tujuan SPIP sebagaimana diatur dalam PP 60/2008. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat bukan hanya formalitas regulasi, tetapi memiliki konsekuensi praktis dalam meningkatkan akuntabilitas desa. Kelemahan implementasi SPI tercermin dari kasus-kasus kecurangan di berbagai daerah, termasuk Bangkalan. Kasus pemalsuan laporan keuangan yang melibatkan aparatur desa (Djasuli & Rohmi, 2025) memperlihatkan bahwa secara konseptual SPI sudah tersedia, tetapi praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Hal ini mengindikasikan adanya *gap* antara regulasi dan implementasi, sekaligus menunjukkan bahwa faktor penguat seperti moralitas individu atau sistem pengawasan eksternal masih diperlukan agar SPI dapat berfungsi optimal. Dengan kata lain, kelemahan bukan pada desain SPI, melainkan pada kepatuhan aktor dalam mengimplementasikannya.

### **Faktor Non-Teknis sebagai Penguat (Moderasi)**

Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang komprehensif merupakan prasyarat utama untuk menjamin integritas pelaporan dan kepatuhan regulasi di pemerintahan desa. Namun, studi-studi teoritis berbasis perilaku, seperti yang diilustrasikan dalam kerangka Tiga Elemen Kecurangan (*Fraud Triangle*) atau yang diperluas menjadi Empat Elemen (*Fraud Diamond*), secara eksplisit membatasi peran SPI. Secara fundamental, SPI dirancang untuk mengeleminasi kesempatan (*opportunity*) melalui prosedur formal. Akan tetapi, SPI seringkali menjadi rentan ketika berhadapan dengan elemen behavioral, yakni rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*) yang dibutuhkan oleh individu untuk mengeksekusi *fraud* (Romadaniati, *et al.*, 2020). Oleh karena itu, efektivitas SPI secara mutlak ditentukan oleh dimensi kualitatif atau faktor non-teknis yang melekat pada aparatur desa itu sendiri.

Faktor-faktor non-teknis ini secara teoretis berfungsi sebagai variabel penguat (*moderator*) yang menentukan apakah SPI akan berfungsi secara optimal atau sekadar menjadi formalitas kepatuhan semata (*check-the-box compliance*). Faktor-faktor ini, yang meliputi domain etika dan spiritual, secara kolektif meningkatkan lingkungan pengendalian (*control environment*) dan memberikan dorongan moral internal (*internal compass*) yang secara inheren menekan niat kecurangan.

### **Moralitas Individu dan Sensitivitas Moral: Benteng Etis Aparatur**

Moralitas individu merupakan seperangkat prinsip etis, nilai luhur, dan standar perilaku yang dipegang teguh oleh aparatur desa. Moralitas ini adalah lapisan pertahanan internal yang paling mendasar, beroperasi sebagai 'rem' etis

yang mampu menekan dorongan rasionalisasi untuk melakukan penyimpangan, bahkan ketika peluang tersedia.

Mekanisme Deteksi dan Dukungan; Peran Audit Internal (Inspektorat) sangat penting di pemerintahan daerah seperti Bangkalan, menjalankan 3 fungsi (pengawas, konsultan, dan katalisator) (Djasuli, *et al.*, 2022). Selain itu, sistem pendukung seperti Sistem *Whistleblowing* memiliki pengaruh parsial signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dengan salah satu studi menunjukkan pengaruh langsung sebesar 54,3% (Maulida & Bayunitri, 2021). Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi Empiris; Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, Moralitas Individu berperan sebagai moderator yang menguji validitas dan kekuatan hubungan antara SPI dan pencegahan *fraud*. Jika hubungan tersebut diperkuat oleh moralitas, hal itu menyiratkan bahwa kekuatan sistem (SPI) hanya akan berfungsi maksimal jika didukung oleh integritas pelaksana. Dukungan empiris terhadap peran ini sangat kuat. Penelitian yang berlokasi di desa-desa di Kabupaten Bengkalis secara tegas membuktikan bahwa Moralitas Individu memiliki peran moderasi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap upaya pencegahan *fraud* (Romadaniati, *et al.*, 2020). Implikasi temuan ini bersifat paradoks: di satu sisi, SPI yang lemah dapat ditambal oleh moralitas yang kuat; namun, SPI yang kuat sekalipun dapat diabaikan atau disiasati oleh individu yang moralitasnya rendah, terutama pada tahap rasionalisasi. Penguatan argumen ini juga datang dari studi Biduri (2023) di Kabupaten Sidoarjo. Melalui analisis Partial Least Square (PLS), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Moralitas Individual terbukti berperan penting

sebagai variabel moderasi dalam upaya pencegahan *fraud*. Kedua temuan ini secara konsisten menyimpulkan bahwa fokus manajerial harus bergeser dari sekadar merancang prosedur (dokumen) menjadi pengembangan karakter dan integritas SDM, sebagai investasi strategis yang memiliki *return* terukur terhadap mitigasi risiko keuangan. Sensitivitas Moral dan Kesadaran Etis; Moralitas harus diterjemahkan menjadi tindakan melalui Sensitivitas Moral (*Moral Sensitivity*), yaitu kemampuan kognitif seseorang untuk secara tepat mengenali dan menginterpretasikan suatu situasi sebagai situasi yang mengandung dilema etika atau potensi konflik kepentingan. Sensitivitas moral memastikan bahwa prosedur SPI diterapkan dengan kesadaran penuh, bukan sekadar kepatuhan mekanis. Sebagai contoh, seorang bendahara yang memiliki sensitivitas moral tinggi tidak hanya akan menandatangani formulir otorisasi karena prosedur mengharuskannya, tetapi ia akan secara aktif mempertanyakan (dan menolak) transaksi yang, meskipun secara formal benar, terasa janggal atau tidak etis. Penelitian yang dilakukan oleh Lorenza, *et al.* (2024) di Surakarta menemukan bahwa Sensitivitas Moral terbukti memiliki peran moderasi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh SPI terhadap pencegahan *fraud*. Kepekaan etis inilah yang membedakan aparatur yang pasif (hanya mematuhi) dengan aparatur yang proaktif (mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan). Sensitivitas Moral memastikan bahwa *control activities* dalam SPI diterapkan dengan kebijaksanaan etis.

Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Intelligence*) dan Bukti Kuantitatif (30,7%); Faktor non-teknis yang lebih mendalam adalah Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Intelligence* - SQ), yang merupakan kapasitas individu untuk

menemukan makna dan nilai tertinggi dalam pekerjaannya dan hidupnya, yang mendorong perilaku yang etis dan otentik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, SQ diyakini mampu menumbuhkan komitmen intrinsik terhadap kebenaran dan pelayanan publik, sehingga secara fundamental mengurangi niat untuk melakukan kecurangan. Sinergi SPIP dan Spiritualitas; Secara teoretis, SPIP dan spiritualitas adalah komponen yang bersifat komplementer (*complementary components*) (Kusumastuti & Afriady, 2024). SPIP menyediakan kerangka kerja kontrol eksternal dan prosedur; sebaliknya, spiritualitas menyediakan dorongan moral internal yang konsisten untuk mematuhi dan menegakkan kerangka kerja tersebut. Dalam lima komponen SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan), spiritualitas secara langsung memperkuat Lingkungan Pengendalian, di mana integritas, nilai-nilai etika, dan filosofi manajemen merupakan fondasi dari seluruh sistem. Besaran Pengaruh Simultan: Data Numerik (30,7%); Dukungan kuantitatif terhadap hipotesis sinergi ini disajikan dengan jelas oleh Buato, *et al.* (2024) dalam studi mereka di Gorontalo. Penelitian ini menguji pengaruh Pengendalian Internal dan Kecerdasan Spiritual secara kolektif. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud*. Temuan kunci numerik adalah; Koefisien Determinasi (R-Square) model sebesar 30,7%. Angka 30,7% ini adalah bukti empiris yang kuat dan tidak terbantahkan yang menegaskan bahwa: 1) Daya Jelas Gabungan: Hampir sepertiga dari keberhasilan upaya pencegahan *fraud* (tepatnya 30,7%)

dapat diatribusikan pada kombinasi antara kualitas sistem kontrol (SPI) dan kualitas etis/spiritual aparatur (SQ). 2) Kepentingan Strategis SDM: Angka ini mengesahkan bahwa pengembangan kualitas spiritual dan moral aparatur bukan lagi kegiatan pelengkap, melainkan komponen strategis yang memiliki dampak terukur dalam mitigasi risiko *fraud*. 3) Implikasi Residu: Sisanya, sekitar 69,3% dari variasi *fraud*, harus dijelaskan oleh faktor-faktor lain, seperti penegakan hukum, kompetensi teknis, budaya organisasi, dan tekanan eksternal (*pressure*) (Buato, *et al.*, 2024). **Kompetensi dan Dukungan Sistem sebagai Pelengkap Non-Teknis**

Selain faktor moral dan spiritual, efektivitas SPI juga sangat bergantung pada faktor manusia terkait kemampuan teknis dan dukungan sistem yang dikelola oleh manusia. Kompetensi Aparatur Desa; SPI yang dirancang sempurna tidak akan berfungsi jika pelaksanaannya (aparatur desa) tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk memahami, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kontrol tersebut. Kompetensi di sini mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa secara akuntabel. Studi Romadaniati, *et al.* (2020) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa juga berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, menegaskan bahwa kemampuan teknis dan pemahaman prosedural adalah dasar yang memastikan SPI dapat diaplikasikan sesuai desain. Di sisi lain, Lorenza, *et al.* (2024) juga menemukan bahwa Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh positif yang signifikan, setara dengan SPI, terhadap pencegahan *fraud*.

## **Sistem Whistleblowing sebagai Kontrol Human-Mediated**

Mekanisme Sistem *Whistleblowing* merupakan kontrol yang sangat penting yang menjembatani antara integritas individu (moralitas) dengan mekanisme deteksi formal. Sistem ini adalah kanal etis yang memungkinkan aparatur atau pihak ketiga melaporkan kecurangan secara aman. Pengaruh sistem ini terhadap pencegahan *fraud* sangat substansial. Salah satu studi yang menguji pengaruh parsial sistem ini menemukan bahwa Sistem *Whistleblowing* memiliki pengaruh langsung sebesar 54,3% terhadap Pencegahan *Fraud* (Maulida & Bayunitri, 2021). Angka 54,3% ini menunjukkan bahwa ketersediaan mekanisme etis untuk melaporkan penyimpangan (yang merupakan fungsi non-teknis yang didorong oleh integritas manusia) memiliki daya dorong tunggal yang lebih besar daripada pengaruh SPI dan SQ secara simultan (30,7%). Hal ini menggarisbawahi urgensi pembentukan saluran pelaporan yang kredibel dan bebas intimidasi.

## **Teknologi sebagai Penguat Kapabilitas Deteksi**

Dalam konteks kecurangan yang semakin canggih, faktor non-teknis juga harus mencakup kapabilitas individu untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat *deteksi* ketika kontrol SPI gagal. Kegagalan SPI yang disebabkan oleh kelemahan institusional di desa (Rifai, *et al.*, 2024) menuntut adanya *control mechanism* yang lebih modern. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa adopsi Analitik *Big Data* (Putra, *et al.*, 2022) dan potensi Artificial Intelligence (AI) (Nurchoiriyah, *et al.*, 2025) merupakan masa depan dari strategi pencegahan dan deteksi *fraud*. Meskipun ini adalah alat teknologi, implementasi dan interpretasi hasilnya sepenuhnya bergantung pada kompetensi dan moralitas aparatur audit

dan pengawas. Teknologi bertindak sebagai penguat kapabilitas SDM, memungkinkan mereka untuk memproses volume data yang masif guna mendeteksi pola anomali yang luput dari kontrol manual SPI.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *critical literature review* (CLR) yang disusun secara sistematis melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam mencegah kecurangan di pemerintah desa. Literatur yang dianalisis mencakup artikel nasional dan internasional dari tahun 2020–2025, yang diperoleh melalui basis data jurnal bereputasi

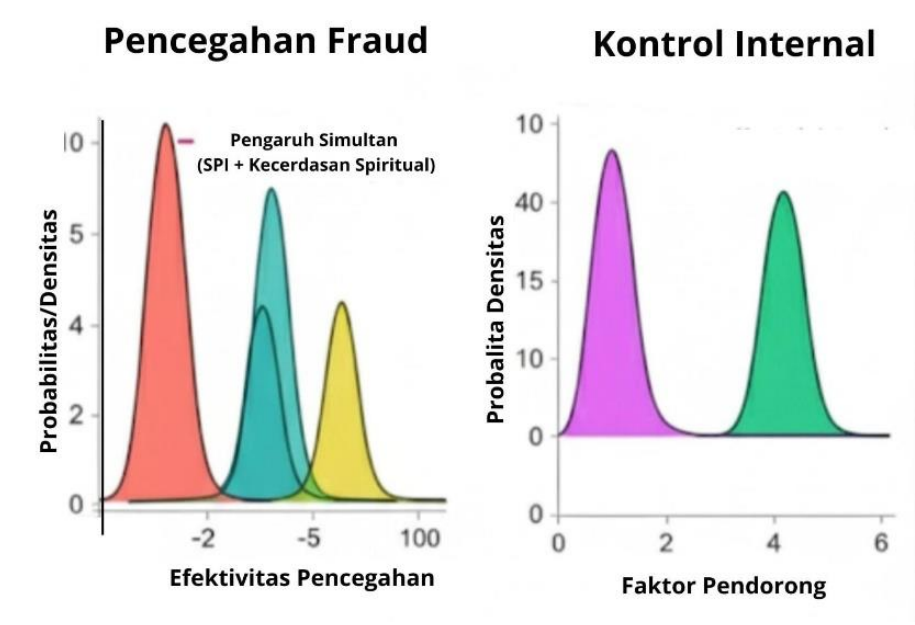
dengan kriteria inklusi berupa penelitian yang membahas variabel SPI, moralitas individu, sensitivitas moral, kecerdasan spiritual, audit internal, serta sistem *whistleblowing*. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta rangkuman temuan numerik seperti koefisien regresi, *t-statistic*, dan *R-square* dari berbagai metode kuantitatif yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya, termasuk regresi linier berganda dan *Structural Equation Modeling* (SEM). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan komprehensif mengenai efektivitas SPI serta faktor non-teknis penguatnya dalam mencegah fraud pada pengelolaan Dana Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Matriks Tinjauan Literatur Kritis (CLR)**

No.	Penulis & Tahun	Fokus (Variabel Independen)	Temuan Utama (Hubungan dengan Fraud)	Kontribusi Khusus/Konteks
1	Oktafiyanti & Auliyah (2024)	Sistem Pengendalian Internal (SPIP)	SPIP dianggap BERHASIL dalam mengantisipasi dan mencegah fraud.	Kualitatif (Pamekasan). Menekankan kepatuhan SPIP PP 60/2008.
2	Romadaniati, et al. (2020)	SPI, Kompetensi, Whistleblowing (Dimoderasi Moralitas).	SPI BERPENGARUH POSITIF & SIGNIFIKAN terhadap pencegahan fraud. Moralitas memperkuat efek SPI.	Kuantitatif (Bengkalis). Menghubungkan SPI dengan faktor personal.
3	Buato, et al. (2024)	Pengendalian Internal, Kecerdasan Spiritual.	Pengendalian Internal BERPENGARUH POSITIF terhadap pencegahan fraud secara parsial dan simultan.	Kuantitatif (Gorontalo). Menyoroti faktor Spiritual sebagai penguat kontrol.
4	Lorenza, et	SPI,	SPI	Kuantitatif

	al. (2024)	Kompetensi, Kepatuhan (Dimoderasi Sensitivitas Moral).	BERPENGARUH POSITIF & SIGNIFIKAN terhadap pencegahan fraud.	(Surakarta). Mendukung peran Moral sebagai moderasi.
5	Biduri (2023)	Moralitas Individual, Whistleblowing, SPI, Kepatuhan.	Moralitas Individu BERPENGARUH dalam mencegah fraud (dapat menjadi moderasi).	Kuantitatif (Sidoarjo). Menarik fokus ke faktor SDM/non-teknis.
6	Djasuli & Rohmi (2025)	Peran Audit Internal (Inspektorat).	Audit Internal BERPERAN SANGAT PENTING dalam strategi deteksi kecurangan.	Konteks Spesifik Bangkalan. Fokus pada deteksi fraud yang sudah terjadi.
7	Pilianti & Rasmini (2021)	Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, TI.	SPI BERPENGARUH POSITIF terhadap Akuntabilitas Dana Desa.	Kuantitatif (Tabanan). Menghubungkan SPI ke hasil akhir (Akuntabilitas).



Gambar 1. Hasil CLR Data

Efektivitas fungsional Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam upaya pencegahan *fraud* pada dasarnya bersifat kontingen, yakni sangat bergantung pada kualitas implementasinya oleh elemen manusia sebagai aktor sentral. Dalam kerangka

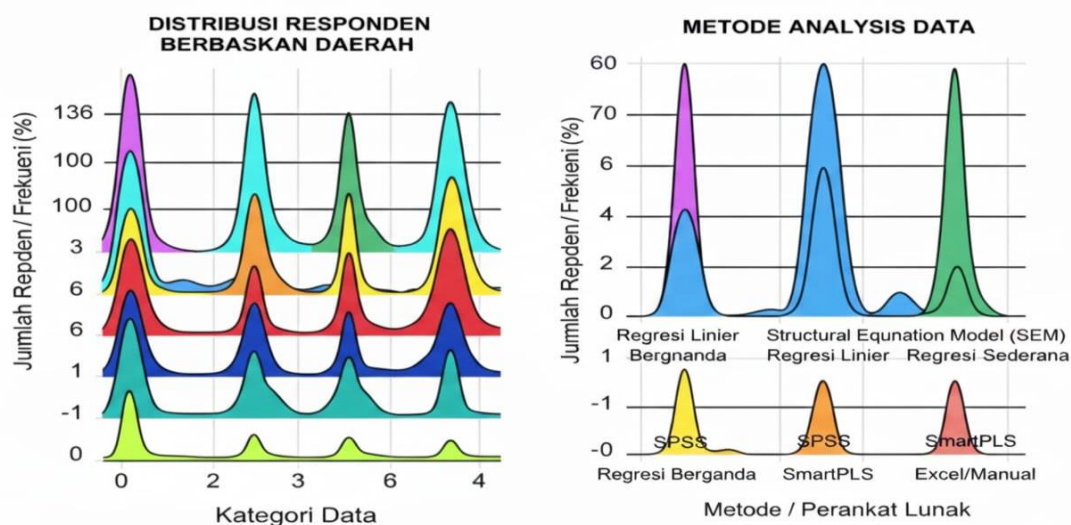
teori perilaku kecurangan (*Fraud Diamond*), SPI dirancang untuk memitigasi elemen kesempatan (*opportunity*), namun secara inheren gagal mengatasi elemen psikologis seperti rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*) pelaku.



Oleh karena itu, literatur akademis secara konsisten menempatkan faktor-faktor non-teknis sebagai moderator krusial yang menentukan apakah SPI akan berfungsi optimal atau sekadar formalitas prosedural. Secara empiris, peran penguatan ini difokuskan pada dimensi etika dan spiritual: Moralitas Individu adalah garis pertahanan etis internal yang berfungsi untuk menekan dorongan rasionalisasi, dan peran ini terbukti signifikan dalam studi-studi terdahulu, di mana Moralitas Individu (Biduri, 2023) dan dimensi terkait seperti Sensitivitas Moral (Lorenza, *et al.*, 2024) terbukti secara konsisten memoderasi dan mengintensifkan pengaruh positif SPI terhadap pencegahan *fraud*. Melampaui moralitas konvensional, dimensi Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Intelligence*) diakui sebagai penguat *control environment* yang esensial, menumbuhkan komitmen intrinsik terhadap integritas. Dukungan kuantitatif terhadap sinergi ini adalah pilar utama temuan CLR: analisis regresi berganda secara simultan membuktikan bahwa kombinasi variabel Pengendalian Internal dan Kecerdasan Spiritual memiliki kontribusi yang signifikan dan terukur,

dengan daya jelas model (Koefisien Determinasi / R-Square) mencapai 30,7% terhadap variabel Pencegahan Fraud (Buato, *et al.*, 2024). Angka 30,7% ini secara eksplisit mengesahkan bahwa hampir sepertiga (sekitar 30%) dari keberhasilan upaya mitigasi *fraud* di pemerintahan desa ditentukan oleh integrasi strategis antara sistem kontrol formal (SPI) dan kualitas etika/spiritual (SQ) dari aparaturnya pelaksana, yang secara kolektif memastikan bahwa kontrol prosedural diterapkan dengan integritas dan kesadaran etis yang tinggi.

Visualisasi data numerik komprehensif ini berfungsi sebagai bukti metodologis yang mendalam (*analytical rigor*) terhadap temuan-temuan kunci yang dirangkum dalam Tinjauan Literatur Kritis (CLR) mengenai Peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Mencegah Kecurangan di Pemerintah Desa. Visual ini secara eksplisit menguatkan validitas eksternal (cakupan sampel) dan validitas internal (ketelitian analisis statistik) dari bukti-bukti kuantitatif yang mendukung argumen tentang signifikansi SPI dan faktor-faktor penguatnya.



**Gambar 2. Hasil CLR Data**

**Tabel 2. Rangkuman Data Numerik dan Metodologis Bukti Kuantitatif**

Sisi Visualisasi	Parameter Kuantitatif	Implikasi Metodologis Utama	Dukungan terhadap Argumen SPI & Pencegahan Fraud
Sisi Kiri: Distribusi Responden	Total $\geq 972$ responden, terdistribusi di 11 daerah (misalnya, Buleleng 136, Blora 118, Pabelan 102, Demak 100).	Validitas Eksternal Tinggi. Menunjukkan generalisasi temuan yang luas ( <i>generalizability</i> ) di berbagai konteks geografis (Indonesia Barat hingga Timur), dari sampel non-homogen yang besar.	Menegaskan bahwa SPI secara universal dan signifikan dibutuhkan di seluruh desa di Indonesia, terlepas dari konteks regional dan budaya, untuk mencegah fraud.
Sisi Kanan: Metode Analisis Data	Dominasi Multiple Regression ( $\approx 10$ studi) dan Structural Equation Model (SEM/PLS, $\approx 4-5$ studi).	Validitas Internal Tinggi. Menggunakan teknik statistik inferensial yang ketat untuk menguji hubungan multivariat yang kompleks dan hipotesis moderasi.	Memvalidasi besaran pengaruh numerik (misalnya, $R^2=30,7\%$ dari SPI + SQ) dan signifikan parsial (t-statistik) yang mendukung peran penguatan faktor non-teknis.
Perangkat Lunak	Penggunaan SPSS (untuk Uji-t, Uji-F, $R^2$ ) dan SmartPLS (untuk t-statistik bootstrapping dan koefisien jalur).	Objektivitas dan Akuntabilitas Analisis. Menjamin bahwa hasil statistik (seperti koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh SPI) diperoleh melalui perangkat lunak standar profesional.	Memperkuat kredibilitas temuan bahwa SPI memiliki pengaruh positif dan signifikan (Romadaniati, et al., 2020; Lorenza, et al., 2024).

### Analisis Mendalam Bukti Kuantitatif Berdasarkan Visualisasi

#### Analisis Validitas Eksternal: Cakupan Sampel dan Generalisasi (Sisi Kiri)

Visualisasi pada sisi kiri, yang menggambarkan Distribusi Responden Berdasarkan Daerah, merupakan bukti kuat akan Validitas Eksternal dari keseluruhan bukti kuantitatif yang digunakan dalam tinjauan ini. Data menunjukkan bahwa temuan mengenai peran SPI dalam pencegahan *fraud* tidak bersifat insidentil atau terisolasi pada satu wilayah tertentu. Tinjauan ini mencakup data dari setidaknya 11 daerah penelitian yang tersebar luas, mulai dari Buleleng (Bali) dengan puncak responden mencapai 136 orang, hingga sampel besar lainnya di Blora (118 responden), Pabelan (102 responden), dan Demak (100 responden), dengan total responden keseluruhan melebihi 972 aparatur desa. Cakupan geografis yang luas melintasi Indonesia Barat (misalnya Bengkalis, Surakarta, Sidoarjo), Tengah, hingga

Timur (Kolaka) menegaskan bahwa kesimpulan yang menyatakan SPI berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Romadaniati, et al., 2020) adalah kesimpulan yang dapat digeneralisasi (*generalizable*). Ini berarti signifikansi SPI sebagai benteng pertahanan keuangan desa adalah suatu keniscayaan di berbagai konteks desa, terlepas dari perbedaan budaya lokal, tingkat pendidikan aparatur, atau tingkat alokasi Dana Desa. Setiap 'puncak' berwarna yang berbeda dalam visualisasi ini merepresentasikan satu studi kuantitatif yang solid dengan sampel yang memadai, yang secara kolektif memperkuat argumentasi bahwa implementasi SPI yang kuat mutlak diperlukan sebagai kebijakan nasional dan lokal untuk meminimalkan risiko kecurangan. Kuantitas dan diversitas sampel yang besar ini memberikan bobot empiris yang jauh lebih meyakinkan dibandingkan studi kasus tunggal.

### **Analisis Validitas Internal: Kedalaman Metodologi dan Rigor Statistik (Sisi Kanan)**

Bagian kanan visualisasi berfokus pada Metode Analisis Data, yang merupakan indikator langsung dari Validitas Internal dan ketelitian statistik dari temuan yang disintesis. Visualisasi ini menunjukkan dominasi penggunaan teknik statistik inferensial yang canggih, yang esensial untuk menguji hubungan *kausalitas* dan *moderasi* yang kompleks yang melandasi tesis utama penelitian ini (yakni peran SPI dan faktor non-teknis).

### **Dominasi Regresi dan SEM/PLS**

Metode yang paling banyak digunakan adalah Regresi Linier Berganda (sekitar 10 studi), yang merupakan alat utama untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari banyak variabel independen (seperti SPI, Moralitas, dan Kompetensi) terhadap variabel dependen (Pencegahan *Fraud*). Teknik ini menghasilkan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang sangat penting, seperti nilai 30,7% yang membuktikan secara kuantitatif kontribusi kolektif SPI dan Kecerdasan Spiritual (Buato, *et al.*, 2024). Lebih lanjut, visualisasi menyoroti penggunaan tingkat tinggi dari Structural Equation Model (SEM), yang diimplementasikan melalui perangkat lunak SmartPLS (sekitar 4-5 studi). Penggunaan SEM/PLS ini sangat relevan karena memungkinkan para peneliti untuk memodelkan hubungan yang lebih rumit, termasuk pengujian

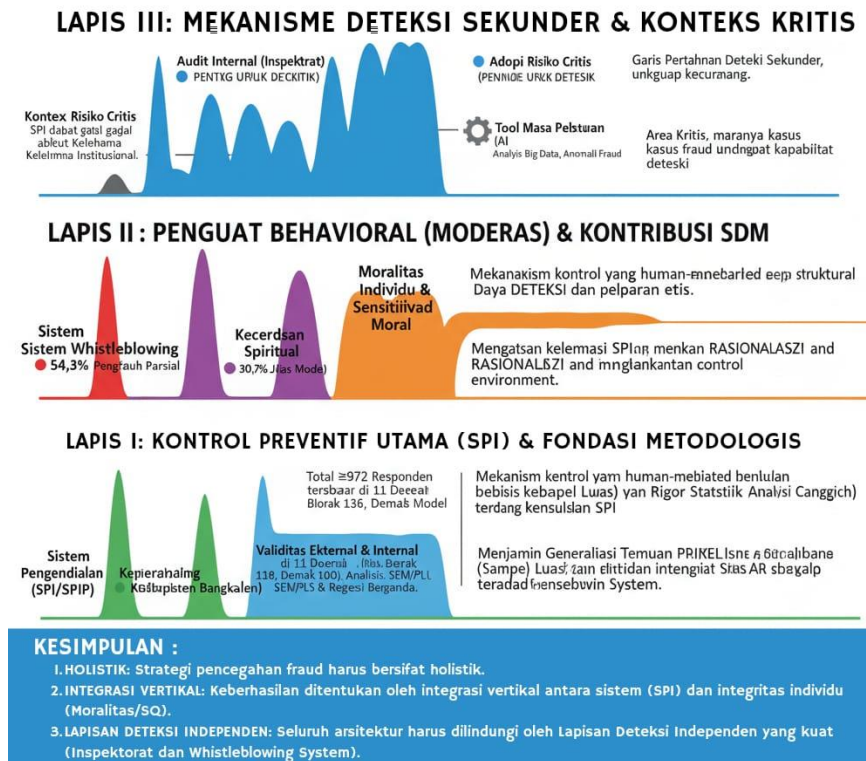
variabel moderasi (Moralitas Individu terhadap hubungan SPI dan *Fraud*) dan pengujian efek jalur yang kompleks (Lorenza, *et al.*, 2024; Biduri, 2023). SmartPLS secara spesifik menghasilkan t-statistik *bootstrapping*, yang digunakan untuk mengonfirmasi signifikansi statistik dari setiap koefisien jalur dan membuktikan *moderasi* tersebut valid, jauh lebih unggul dibandingkan analisis regresi linier sederhana.

### **Kredibilitas Alat Perangkat Lunak**

Kredibilitas metodologis juga diperkuat oleh konsistensi penggunaan perangkat lunak profesional: SPSS dan SmartPLS. SPSS digunakan untuk pengujian hipotesis regresi dasar, termasuk perhitungan Uji-F (pengaruh simultan) dan Uji-t (pengaruh parsial), serta memastikan dipenuhinya Uji Asumsi Klasik. Sementara itu, SmartPLS menggarisbawahi komitmen terhadap metodologi yang mutakhir untuk model hubungan kausal yang kompleks. Kesimpulannya, visualisasi pada sisi kanan memberikan jaminan bahwa temuan numerik yang digunakan untuk mendukung peran SPI, Moralitas, Kecerdasan Spiritual, dan Sistem *Whistleblowing* (dengan pengaruh parsial  $\geq 54,3\%$ ) diolah melalui proses statistik yang ketat, modern, dan tidak bias. Ini adalah landasan yang solid untuk membuat klaim ilmiah mengenai upaya pencegahan *fraud* di pemerintahan desa.

### **Struktural (SPI), Penguat Behavioral (Moralitas/SQ), dan Mekanisme Deteksi (Audit Internal/Whistleblowing)**

## SINTESIS INFOGRAFIS KOMPREHENSIF CLR: ARSITEKTUR PERTAHANAN FRAUD PEMERINTAHAN DESA



**Gambar 3. Kesimpulan dari Data CLR**

Analisis komprehensif dari Tinjauan Literatur Kritis (CLR) yang didasarkan pada sintesis mendalam dari 35 data dan referensi ilmiah mutakhir secara konklusif menegaskan bahwa mitigasi *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa membutuhkan arsitektur pertahanan berlapis yang jauh melampaui kepatuhan prosedural semata, yang berpuncak pada integrasi kontrol struktural, integritas behavioral, dan mekanisme deteksi yang kuat. Validitas temuan ini didukung oleh fondasi metodologis yang luas dan ketat: secara Validitas Eksternal, data berasal dari basis sampel yang sangat luas, mencakup total minimal 972 responden yang terdistribusi secara heterogen di 11 wilayah penelitian yang beragam (seperti Buleleng, Blora, dan Demak), sehingga menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik memiliki daya generalisasi yang tinggi di berbagai

konteks regional dan institusional desa di Indonesia. Sementara itu, Validitas Internal dipastikan melalui penggunaan teknik statistik inferensial tingkat lanjut, terutama dominasi Regresi Linier Berganda dan Structural Equation Modeling (SEM), yang diimplementasikan menggunakan perangkat lunak profesional seperti SmartPLS, yang esensial untuk menguji model hubungan kausal yang kompleks dan hipotesis moderasi. Dalam kerangka kerja ini, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dikonfirmasi sebagai mekanisme preventif primer yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud* (Romadaniati, *et al.*, 2020; Lorenza, *et al.*, 2024), di mana fungsinya secara fundamental adalah mengeleminasi elemen kesempatan (*opportunity*) yang disyaratkan oleh teori *Fraud Diamond*.

Namun, hasil CLR ini secara kritis menggeser fokus dari SPI sebagai solusi tunggal menuju urgensi faktor non-teknis yang berfungsi sebagai penguat (*moderator*) untuk mengatasi elemen behavioral kecurangan, khususnya rasionalisasi dan kemampuan (*capability*). Dimensi Moralitas Individu dan Sensitivitas Moral secara empiris terbukti berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan, yang mengintensifkan hubungan positif SPI dan pencegahan *fraud* (Biduri, 2023; Lorenza, *et al.*, 2024). Peran moderasi ini sangat krusial; ia memastikan bahwa SPI tidak hanya dipatuhi secara mekanis, tetapi diterapkan dengan kesadaran etis yang tinggi, sehingga secara efektif meruntuhkan landasan rasionalisasi yang dibutuhkan oleh pelaku *fraud* untuk menjustifikasi penyimpangannya. Penguatan etika ini mencapai tingkat kuantifikasi yang terukur melalui dimensi Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Intelligence*). Analisis simultan terhadap SPI dan SQ menemukan bukti numerik yang mencolok: kedua variabel ini secara kolektif menjelaskan 30,7% variasi pada variabel Pencegahan *Fraud* (Buato, *et al.*, 2024). Koefisien determinasi sebesar 30,7% ini adalah angka strategis yang secara tegas mengesahkan bahwa hampir sepertiga keberhasilan mitigasi *fraud* di pemerintahan desa bergantung pada investasi terukur pada kualitas etika dan spiritual aparatur, menjadikannya aset strategis yang terintegral dengan sistem kontrol.

Selain penguat etis internal tersebut, analisis juga mengidentifikasi mekanisme kontrol yang diaktivasi oleh faktor manusia yang memiliki daya deteksi eksternal yang luar biasa, yaitu Sistem *Whistleblowing*. Sistem pelaporan etis ini, yang keberhasilannya bergantung pada integritas dan jaminan keamanan pelapor, terbukti memiliki

pengaruh parsial yang sangat kuat, mencapai 54,3% terhadap Pencegahan *Fraud* (Maulida & Bayunitri, 2021). Angka ini, yang jauh melampaui pengaruh simultan SPI dan SQ, menyoroti bahwa ketersediaan dan kredibilitas saluran pelaporan adalah garis pertahanan yang paling efektif dalam menangkap kecurangan pada tahap awal atau tengah. Kendati demikian, kerangka pertahanan ini tidak akan lengkap tanpa lapisan korektif yang kuat. Mengingat literatur menunjukkan bahwa kegagalan SPI seringkali berakar pada kelemahan institusional dan kurangnya transparansi di tingkat desa (Rifai, *et al.*, 2024), kebutuhan akan kontrol deteksi sekunder menjadi sangat mendesak. Dalam konteks wilayah dengan risiko tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh kasus maraknya *fraud* berupa pemalsuan laporan keuangan di Kabupaten Bangkalan, peran Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditegaskan sangat vital sebagai strategi deteksi kecurangan sekunder yang optimal (Djasuli & Rohmi, 2025). Inspektorat bertindak sebagai mekanisme *check and balance* korektif yang diperlukan untuk mengungkap penyimpangan yang telah berhasil menyalahi kontrol preventif SPI. Lebih jauh, tinjauan terhadap perkembangan teknologi menggarisbawahi bahwa di masa depan, kemampuan deteksi ini akan ditingkatkan melalui adopsi *Big Data Analytics* dan Artificial Intelligence (AI), yang akan memperkuat kapabilitas SDM audit dalam memproses anomali data (Putra, *et al.*, 2022; Nurchoiriyah, *et al.*, 2025). Secara kolektif, dari sintesis 35 data ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan *fraud* harus mengadopsi model pertahanan berlapis tiga: dimulai dari SPI Struktural (Lapisan I) yang diamplifikasi oleh

Moralitas dan Kecerdasan Spiritual (Lapisan II) untuk menekan rasionalisasi, dan disempurnakan dengan Audit Internal dan Sistem *Whistleblowing* (Lapisan III) sebagai mekanisme deteksi yang memiliki pengaruh kuantitatif paling besar, memastikan bahwa akuntabilitas Dana Desa ditegakkan secara komprehensif.

Analisis yang bersumber dari sintesis 35 data dan referensi akademik kontemporer secara definitif menyimpulkan bahwa upaya mitigasi kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa harus diwujudkan melalui sebuah arsitektur pertahanan yang berlapis suatu pendekatan yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi administratif. Mengapa model berlapis ini mutlak? Karena sifat dasar fraud adalah multidimensional. Kontrol prosedural, yang diwakili oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI), utamanya hanya efektif untuk menanggulangi elemen kesempatan (*opportunity*); namun, SPI terbukti rentan terhadap elemen behavioral seperti rasionalisasi dan kemampuan (*capability*) yang dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan. Oleh karena itu, efektivitas SPI hanya dapat dicapai melalui integrasi strategis dengan faktor-faktor non-teknis yang bersumber dari integritas personal aparat.

Klaim-klaim yang dihasilkan dari CLR ini memiliki landasan metodologis yang sangat kokoh, menjamin keandalan temuan. Validitas Eksternal model terbukti dari basis data yang masif: total minimal 972 responden yang diperoleh dari 11 wilayah penelitian yang beragam secara geografis seperti Buleleng, Blora, dan Demak mengindikasikan bahwa kesimpulan ini memiliki daya generalisasi yang tinggi di berbagai institusi desa. Sementara itu, Validitas Internal dipastikan melalui penggunaan

teknik statistik inferensial tingkat lanjut, terutama dominasi Structural Equation Modeling (SEM) dan Regresi Linier Berganda. Penggunaan perangkat lunak profesional seperti SmartPLS memastikan bahwa hubungan kausalitas dan peran moderasi diuji dengan rigor statistik yang tinggi, menghasilkan bukti yang kredibel. Dalam kerangka kerja yang solid ini, SPI dikonfirmasi sebagai mekanisme preventif utama yang memiliki korelasi positif signifikan terhadap upaya pencegahan fraud (Romadaniati, et al., 2020; Lorenza, et al., 2024). Analisis kemudian bergerak pada pertanyaan bagaimana SPI dapat dioptimalkan. Jawabannya terletak pada fungsi moderasi dari integritas SDM. Dimensi Moralitas Individu dan Sensitivitas Moral secara empiris membuktikan perannya yang krusial dalam mengintensifkan hubungan positif antara SPI dan mitigasi kecurangan (Biduri, 2023; Lorenza, et al., 2024). Peran ini sangat strategis: Moralitas berfungsi sebagai filter etis internal yang secara efektif meniadakan rasionalisasi tahap psikologis di mana pelaku menjustifikasi tindakan koruptif mereka. Dengan demikian, SPI tidak lagi hanya bergantung pada kepatuhan prosedural yang mekanis, tetapi dijalankan dengan kesadaran etis yang tinggi.

Pengaruh krusial dari dimensi behavioral ini terkuantifikasi secara definitif melalui studi tentang Kecerdasan Spiritual (SQ). Analisis simultan antara SPI dan SQ menunjukkan bukti numerik yang menonjol: kedua variabel tersebut secara kolektif bertanggung jawab atas 30,7% variasi yang terjadi pada variabel Pencegahan Fraud (Buato, et al., 2024). Koefisien determinasi sebesar 30,7% ini adalah angka strategis yang secara eksplisit mengesahkan bahwa hampir sepertiga keberhasilan mitigasi fraud di

pemerintahan desa bergantung pada sinergi terukur antara kekuatan sistem kontrol formal dan kualitas spiritual-etis pelaksanaannya. Temuan ini membenarkan bahwa investasi pada pengembangan karakter dan integritas aparat adalah prasyarat strategis yang setara pentingnya dengan perbaikan sistem teknis.

Selain kontrol internal, kerangka pertahanan juga memerlukan mekanisme deteksi eksternal yang kuat. Untuk apa mekanisme deteksi ini diperlukan? Untuk menangkap kecurangan yang sudah terjadi atau yang berhasil menyiasati lapisan preventif. Mekanisme ini diwakili oleh Sistem Whistleblowing, yang didorong oleh faktor integritas manusia, dan terbukti memiliki pengaruh parsial yang sangat besar, mencapai 54,3% terhadap Pencegahan Fraud (Maulida & Bayunitri, 2021). Besarnya angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan saluran pelaporan yang kredibel dan terjamin keamanannya merupakan garis pertahanan yang paling efektif dan paling cepat dalam mengungkap penyimpangan yang telah terlanjur terjadi.

Terakhir, kerangka korektif ini harus dilengkapi dengan pengawasan independen. Di mana peran ini paling mendesak? Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kegagalan SPI seringkali berakar pada kelemahan institusional dan rendahnya transparansi di tingkat desa (Rifai, et al., 2024). Oleh karena itu, dalam konteks wilayah dengan risiko tinggi, seperti kasus maraknya pemalsuan laporan keuangan di Kabupaten Bangkalan, peran Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditegaskan sebagai strategi deteksi kecurangan sekunder yang optimal (Djasuli & Rohmi, 2025). Inspektorat berfungsi sebagai check and balance korektif yang diperlukan untuk

menjamin akuntabilitas final. Model pertahanan masa depan bahkan akan diperkuat oleh adopsi teknologi seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence (AI), yang akan meningkatkan capability SDM Audit dalam memproses anomali data (Putra, et al., 2022; Nurchoiriyah, et al., 2025).

Secara kolektif, sintesis dari 35 data ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan fraud harus mengadopsi model pertahanan berlapis tiga: dimulai dari SPI Struktural (Lapisan I) untuk membatasi peluang; diperkuat oleh Moralitas dan Kecerdasan Spiritual (Lapisan II) untuk menekan rasionalisasi dengan kontribusi terukur 30,7%; dan disempurnakan dengan Sistem Whistleblowing dan Audit Internal (Lapisan III) sebagai mekanisme deteksi yang memiliki pengaruh kuantitatif terbesar, menjamin bahwa akuntabilitas Dana Desa ditegakkan secara komprehensif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kajian ini menegaskan bahwa pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa tidak dapat bergantung pada satu instrumen tunggal, melainkan membutuhkan pendekatan berlapis yang mengintegrasikan sistem pengendalian internal yang kuat, kualitas etika aparatur, serta mekanisme deteksi yang efektif. Sistem Pengendalian Internal (SPI) terbukti menjadi fondasi utama dalam meminimalkan peluang terjadinya fraud, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor non-teknis seperti moralitas, sensitivitas moral, dan kecerdasan spiritual yang memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan kontrol dengan penuh integritas. Selain itu, audit internal oleh Inspektorat dan sistem *whistleblowing* berperan penting dalam mengidentifikasi penyimpangan yang lolos dari pengendalian preventif.



Oleh karena itu, strategi pencegahan fraud harus dirancang secara komprehensif dengan memperkuat struktur kontrol, membangun budaya etis, dan memastikan keberfungsian mekanisme pengawasan berkelanjutan agar tata kelola Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asril, A. K., Taufik, T., & Silalahi, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha)*, 15(04).
- Biduri, S. (2023). Pencegahan Kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 185-196.  
<https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.005>
- Buato, M. A., Niswatin, & Lukum, A. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kec. Buliyohuto. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1904-1915.  
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5827>
- Budiarto, D. S., & Isnaeni, R. (2022). The Role of Internal Control System and Spirituality on Fraud Prevention in Village Fund Management. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 10(1).  
<https://doi.org/10.21107/jaffa.v10i1.13943>
- Dali, N., Safaruddin, & Yulistina, H. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi & Keuangan (JAK)*, 10(1).
- Dewi A., P. N. A. (2024). Individual Morality and Internal Control Systems on Indications of Fraud Prevention in Village Financial Management in Indonesia: A Literature Review. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2).  
<https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.330>
- Djasuli, M., & Rohmi, N. (2025). Optimalisasi Peran Audit Internal: Strategi Deteksi Kecurangan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. *Account; International Journal for accountancy, Finance, and Banking*, 12(1), 2564-2573.
- Djasuli, M., Putri, A., Syofiyun, N., Ismiyanti, & Indra, D. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan di Pemerintah Desa. *SMINAR.docx*. (Referensi file umum)
- Husna, H., & Abdullah, S. (2025). Membangun Sistem Pengendalian: Mengurangi Risiko Kecurangan Melalui Fraud Triangle\_Systematic Literatur Review. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 10(1), 58-74.
- Kurniawan, R. H., & Rahardjo, S. N. (2024). Determinants of fraud in the village government: testing whistleblowing systems, internal control systems and village apparatus competencies. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(4), 537-552.  
<https://doi.org/10.22219/jaa.v7i4>



- [36914](#)  
Kusumastuti, E. D., & Afriady, A. (2024). The Role of Spirituality in Fraud Prevention with the Government Internal Control System. *ODJ-2024-3-8.pdf*. (Referensi file umum)
- Kusumastuti, E. D., & Afriady, A. (2024). The Role of Spirituality in Fraud Prevention with the Government Internal Control System. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 638-655.  
<https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.53>
- Lorenza, R., Setiawati, E., & Bawono, A. D. B. (2024). The Influence of Village Apparatus Competence, Compliance with Financial Reporting and Internal Control Systems on Fraud Prevention with Moral Sensitivity as A Moderation Variable. *The International Journal of Business Management and Technology*, 8(1).
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 2(4), 275-294.  
<https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Moeljono. (2023). Fraud Pengelolaan Dana Desa di Tinjau dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Semarang. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 5(1).
- Murtanto, Ferisanti, & Banjarnahor, E. (n.d.). Determinants of Fraud Prevention in Village Fund Management with Organizational Justice as Moderator. *Indonesian Management and Accounting Research (IMAR)*, 21(1).  
<http://dx.doi.org/10.25105/imar.v21i1.13221>
- Ni Putu Anggi Febiyanti Indah Putri, Prayudi, M. A., & Putra, P. Y. P. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, Good Governance, Kompetensi Aparatur Desa, dan Job Rotation terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *VJRA*, 14(1).
- Nurchoiriyah, A. P., Sofia, E., Djasuli, M., Fitriyah, & Amala, K. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(2), 365-372.  
<https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.2978>
- Oktafiyanti, A. N., & Auliyah, R. (2024). Evaluation of Internal Control of Village Fund as Fraud Prevention (Study on the Village of Branta Tinggi). *Pak. j. life soc. Sci.*, 22(2), 9358-9364.  
<https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00708>
- Pilianti, N. K. D., & Rasmini, N. K. (2021). The Effect of Community Participation, Competency of Employees, Utilization of Information Technology, and Internal Control Systems on Fund Accountability. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(3), 361-366.
- Putra, I., Hidayat, S., & Rahayu, S. (2022). Literature Review: Whistleblowing System Activist Simultancy, Big Data Analytics on Fraud Prevention. *International Journal of Business and Technology Management*, 4(1), 37-45.  
<https://doi.org/10.55057/ijbtm.20>

22.4.1.5

- Putri, N. A., Mudrifah, Irawan, D., & Wicaksono, A. P. N. (2024). Fraud Prevention in Village Fund Managemant. *ASSETS*, Edisi Juli 2024..
- Putri, P. I. A., Sumadi, N. K., & Andayani W, R. D. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Edisi Juli 2024.
- Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.*, 32(3), 1115–1140.  
<https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15>
- Romadaniati, T., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government With Individual Morality as Moderated Variables (Study in Villages in Bengkalis District). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Santika, K. S., Budiadnyani, N. P., Prena, G. D., & Kusuma, P. S. A. J. (2024). Pengaruh Financial Pressure, Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(02).
- Situmeang, B. J. M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 5(1), 25-36.
- Suci Rahmadani, & Sugiarto. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 5(1).
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16(2).